



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEUKU SYAHLUNA POLEM**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **269445**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.430.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 319 m2/120 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 434 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, WARISAN Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 7584 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, WARISAN Rp. 366.000.000
4. Tanah Seluas 7811 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, WARISAN Rp. 264.000.000
5. Tanah Seluas 99629.5 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, WARISAN Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 634 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, WARISAN Rp. 500.000.000
7. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT, WARISAN Rp. 150.000.000
8. Tanah Seluas 1840 m2 di KAB / KOTA NAGAN RAYA, WARISAN Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 150.000.000**

1. MOTOR, HONDA TIGER SEPEDA MOTOR Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000



2. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 1900, WARISAN Rp. 2.000.000
4. MOBIL, VW MINI BUS Tahun 1900, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 30.000.000
5. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 40.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.620.000.000

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.620.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.